

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 97- 107	Juli 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

## **TINGKAT PENDAPATAN KARYAWAN K3L UNIVERSITAS PADJAJARAN**

**Elisabeth Risky Puspitasari**

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran  
*eriskypuspita@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang alasan mengapa pendapatan yang diterima oleh pekerja K3L Universitas Padjadjaran tidak sesuai dengan UMR kota Sumedang. Metode penelitian dalam pembuatan artikel ini yaitu kuantitatif dengan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja K3L Unpad dengan sampel sebesar 24 orang yang dipilih secara accidental. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu penulis berkesempatan mewawancarai langsung karyawan K3L Unpad dengan pertanyaan yang telah disiapkan dan studi literatur yaitu mengambil teori yang sesuai dari buku atau jurnal online untuk menguatkan pernyataan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh pekerja K3L Universitas Padjadjaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh pekerja K3L Unpad sangatlah rendah sehingga mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang sejahtera. Akibatnya dengan memiliki pendapatan yang rendah, terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang menjadi sulit apalagi untuk urusan pendidikan mereka dan keluarganya. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu penetapan UMR di setiap provinsi, kota maupun kabupaten ternyata tidak cukup membantu menyejahterakan pekerja K3L Unpad karena dari pihak Universitasnya sendiri tidak memberlakukan hal tersebut. Jam kerja yang singkat dan status pekerja K3L Unpad yang masih kabur apakah termasuk ke dalam pekerja honorer atau tetap menjadi pertimbangan bagi pihak Universitas untuk tidak memberlakukan UMR sesuai dengan ketentuan UMR Kota Sumedang.

Keywords : K3L Unpad, pendidikan rendah, pendapatan rendah, UMR

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the income received by workers K3L Padjadjaran University Research methods in making this article is quantitative with survey techniques. The population in this study were Unpad K3L workers with a sample of 24 people who were chosen accidentally. Data collecting technique is done by interview, the writer has the opportunity to interview directly the employees of K3L Unpad with the prepared questions and the literature study is to take the appropriate theory from the book or online journal to strengthen the statement about the problem being faced by workers of K3L Padjadjaran University. The results showed that the income received by Unpad K3L workers is so low that they are unable to achieve a prosperous life. As a result of having low incomes, the fulfillment of basic needs such as food, shelter, and clothing becomes difficult especially for their education and health affairs and their families. One of the government policies that UMR in the province, city, or district was not enough to help welfare workers Unpad K3L because of the University itself does not enforce it. Short working hours and unpad status of K3L Unpad workers are still vague whether honorary workers or remain a consideration for the University not to enforce the UMR in accordance with the provisions of UMR Sumedang City.

Keywords : K3L Unpad, low education, low income, UMR

## Pendahuluan

Mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang tinggi dan tetap tentu menjadi dambaan semua orang. Tak jarang banyak orang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sejumlah pendapatan yang cukup demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat menjadi faktor pendorong seseorang harus memiliki pendapatan yang tinggi demi mencapai kesejahteraan hidup.

Pendapatan yang tinggi tentu akan didapat oleh mereka yang memiliki kualitas sumber daya yang baik. Keahlian suatu bidang ketrampilan atau ilmu pengetahuan bisa didapatkan melalui pendidikan. Namun saat ini, tak sedikit orang walaupun sudah menempuh pendidikan tinggi dengan biaya yang cukup banyak, belum bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai. Hasil kerja mereka terkadang tidak jauh berbeda dengan orang yang bukan berasal dari lulusan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan mereka yang sudah menempuh suatu pendidikan, tidak mendapatkan suatu keahlian khusus untuk dijadikan modal dalam bekerja.

Dalam Tribunnews.com Rabu, 13 Juni 2018 lalu, Kementrian Ketenagakerjaan RI, Bambang Satrio Lelono mengungkapkan bahwa mereka yang berasal dari lulusan menengah atas (sarjana) memiliki under qualified yaitu kemampuan mereka tidak menunjukkan sarjananya sehingga pekerjaan yang didapat berada di level bawah. Melihat hal tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang mendapatkan pendapatan yang layak. Jadi Kesimpulannya adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan bagus belum tentu dapat seutuhnya mendapatkan pekerjaan layak, apalagi orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun kemampuan khusus, sudah dipastikan bahwa jaminan hidupnya rendah.

Selain minimnya kualitas sumber daya manusia, masalah yang sering terjadi pada dunia kerja adalah hak-hak buruh ataupun karyawan banyak yang tidak dihargai khususnya

mereka yang memiliki latar belakang pendidikan minim dimana mereka sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi perusahaan seperti pemberian gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan atau keterlambatan gaji dari penanggalan yang telah disepakati antara pekerja dengan perusahaan.

Untuk menindaklanjuti masalah yang terjadi dalam dunia kerja, pemerintah harus ikut campur tangan dalam mencari solusinya. Selain membuat kebijakan yang melindungi kaum buruh ataupun karyawan, pemerintah pun menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) di setiap provinsi yang ada di Indonesia. UMR merupakan suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Adanya penerapan gaji UMR digunakan untuk melindungi hak para tenaga kerja dalam mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja. UMR tidak hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi, tetapi juga bagi mereka yang tidak mampu menempuh suatu pendidikan tinggi tetapi memiliki suatu ketrampilan atau keahlian khusus yang diperlukan oleh suatu perusahaan asal sudah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan gaji UMR. Selain itu tujuan ditetapkannya UMR yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penetapan gaji yang harus diterima oleh seseorang yang sudah diangkat sebagai karyawan oleh suatu perusahaan. Perlu diketahui bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tiap daerah di Indonesia berbeda. Hal ini disesuaikan oleh pemerintah melalui pendapatan yang diterima di tiap-tiap daerah. Selain itu tidak semua perusahaan wajib memberikan upah kepada para pekerjanya sesuai dengan UMR pemerintah ataupun tidak semua pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah UMR tersebut, tetapi diperlukannya suatu syarat-syarat khusus seseorang atau perusahaan wajib melaksanakan UMR tersebut.

Upaya pemerintah yaitu penetapan UMR pada kenyataannya belum benar-benar diterapkan oleh beberapa perusahaan. Banyak perusahaan tidak mampu mengikuti kebijakan

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 97- 107	Juli 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

pemerintah ini oleh karena pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak tinggi. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang tidak memungkinkan mengikuti ketentuan UMR ini menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini dapat kita lihat melalui kebijakan yang ada di Universitas Padjajaran kepada para pekerja K3L nya.

Dalam artikel ini penulis mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin baik dari karyawan K3L Universitas Padjajaran maupun pihak yang mengelola K3L tersebut. Hal ini dilakukan agar penulis dapat mengkaji apakah yang dilakukan pihak Universitas sudah benar atau belum mengenai penetapan gaji kepada karyawan K3L nya. Penulis mencoba untuk menghubungkan dampak apa yang terjadi terhadap keluarganya apabila pendapatan yang dimiliki adalah rendah. Selain itu sebagai pekerja sosial, penulis mencoba menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang pekerja sosial apabila melihat kasus tersebut.

Untuk itu, adapun tujuan pembuatan artikel ini adalah mencari informasi tentang keadilan pemberian upah baik dari pihak karyawannya sendiri maupun pihak Universitasnya agar dapat ditemukan solusi yang tidak memberatkan sebelah pihak.

### Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dengan teknik survei dimana penulis berkesempatan mewawancarai langsung karyawan K3L Universitas Padjajaran dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Penelitian ini dilaksanakan di sektor 3 yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dan sektor 8 yaitu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran. Penelitian dilakukan selama 1 hari yaitu pada bulan Mei 2018. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Tabel Frekuensi yang telah diolah bersama-sama oleh kelompok dan studi literatur yang berasal dari buku ataupun jurnal online untuk memperkuat gagasan hasil olahan data.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A. K3L Universitas Padjajaran

K3L yang merupakan singkatan dari Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan

lingkungan yang berada di Universitas Padjajaran memiliki tugas membersihkan sampah-sampah sekitar universitas baik dari tumpukan sampah yang dihasilkan oleh mahasiswa pada hari kemaren hingga daun-daun yang berjatohan serta perawatan tanaman di lingkungan Universitas. K3L Unpad merupakan bentuk aksi sosial untuk memberdayakan warga yang tinggal di sekitar Jatinangor.

K3L Unpad terbentuk pada awal 2012. Sebelumnya pada 2009 sampai 2011 pekerjaan ini dikelola oleh lembaga swasta yang kemudian dikelola oleh Unpad. Sekarang, Unpad memiliki 345 pekerja K3L yang terbagi dalam sepuluh zona. Dua zona di Kampus Unpad Dipatiukur, dan delapan zona di Kampus Unpad Jatinangor. Status pekerjaan mereka bersifat outsourcing karena tidak diatur oleh kementerian tenaga kerja melainkan merupakan bagian dari aksi sosial yang dilakukan oleh Unpad. Upah yang diterima oleh pekerja K3L Unpad sebesar Rp 650.000 per bulan dan baru ada kenaikan pada dua tahun yang lalu sebesar Rp 100.000 sehingga menjadi Rp 750.000 per bulan. Upah tersebut dibayar langsung oleh pihak Unpadnya dengan transfer ke rekening masing-masing petugas. Lama bekerjanya sekitar 5 jam dari pukul 07.00-11.00 WIB. Tidak ada sistem lembur kecuali terdapat permintaan dari mahasiswanya jika ada kegiatan sampai malam. Upahnya pun disesuaikan dengan lama waktu kegiatan tersebut.

Mengutip dari blog salah satu mahasiswa Universitas Padjajaran mengenai K3L Unpad, ternyata ditemukan empat permasalahan tentang hak-hak pekerja yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Adapun empat permasalahan tersebut yaitu Pertama, perjanjian/kontrak kerja operator K3L Unpad dengan pihak Unpad tidak sesuai dengan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, upah yang didapatkan tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Sumedang tahun 2017. Ketiga, tidak adanya Tunjangan Hari Raya (THR). Keempat, tidak adanya jaminan kesehatan.

Walaupun pihak pekerja telah melakukan beberapa kali aksi protes terhadap pihak Universitas, sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari Rektorat mengenai permasalahan ini. Bahkan yang sangat

disayangkan adalah status pekerja mereka sebenarnya belum resmi, apakah mereka merupakan pekerja honorer karena hanya bekerja 5 jam per hari atau pekerja tetap karena sebagian dari mereka sudah bekerja kurang lebih selama empat tahun.

### B. RENDAHNYA PENDAPATAN YANG DITERIMA MENYEBABKAN RENDAHNYA KESADARAN AKAN PENDIDIKAN

Tabel 1 Total Penghasilan Keluarga Pekerja K3L Unpad

No	Rata-Rata Total Penghasilan Keluarga Perbulan	F	%
1	<1.000	5	20,83%
2	1.000-<2.000	10	41,67%
3	2.000-<3.000	5	20,83%
4	3.000 ke atas	4	16,67%
Total		24	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Tabel 2 Total Pengeluaran Keluarga Pekerja K3L Unpad

No	Rata-rata Total Pengeluaran Keluarga Perbulan	F	%
1	>1.000	9	37,5%
2	1.000-<2.000	7	29,16%
3	2.000-<3.000	6	25%
4	3.000 ke atas	2	8,3%
Total		24	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Menurut hasil data wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tingkat kesejahteraan pekerja K3L Unpad adalah rendah. Hal ini terbukti dari tabel 1 dan tabel 2 yang menyatakan bahwa penyebab kurangnya kesejahteraan pekerja K3L Unpad dikarenakan penghasilan yang dimiliki oleh sebagian besar pekerja K3L Unpad lebih kecil daripada pengeluaran yang harus dikeluarkan. Akibatnya, para pekerja K3L Unpad mau tidak mau harus memangkas beberapa kebutuhan yang menurut mereka kurang memiliki manfaat. Berdasarkan wawancara kemaren, ditemukan informasi juga bahwa jika kita nominalkan secara rinci

pendapatan dan pengeluaran pekerja K3L Unpad yaitu total pendapatan yang diterima rata-rata sebesar Rp 1.500.000 perbulan sedangkan total pengeluaran yang harus dikeluarkan (belum termasuk biaya pendidikan semua anaknya) rata-rata total berkisar antara Rp 1.200.000 – Rp 1.500.000. Hal ini tentu tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan dasar keluarga.

Belum lagi jika kita lihat pada Tabel 3, jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah rata-rata berjumlah lebih dari 4 orang. Maka jika dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan seperti pangan, papan, sandang tentu sudah cukup menghabiskan banyak uang. Akibatnya kebutuhan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang dipangkas oleh kebanyakan pekerja K3L Unpad demi dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lain.

Pernyataan mengenai pendidikan anak-anak dari pekerja K3L Unpad yang dipangkas demi memenuhi kebutuhan hidup lainnya dapat kita lihat pada tabel 3, 4, dan 5 dimana mereka yang memiliki banyak anak, rata-rata hanya 1 anak saja yang menjadi beban keluarga. Ini membuktikan bahwa banyak anak dari pekerja K3L Unpad tidak mendapatkan hak pendidikan guna memperoleh pengetahuan untuk memperbaiki kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Pendidikan yang tidak didapatkan oleh anak-anak dari pekerja K3L Unpad ini tentu akan menjadi salah satu faktor pendorong mengapa keluarga pekerja K3L Unpad sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk merubah diri menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam hal ini kapasitas yang dimaksud adalah pengetahuan yang dimiliki atau ketrampilan khusus yang dimiliki.

Tabel 3 Persentase jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah

No	Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal serumah	F	%
1	0	0	0%
2	1	1	4,16%
3	2	1	4,16%
4	3	8	33,33%
5.	>4	14	58,3%

Total		24	100%
-------	--	----	------

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Tabel 4 Persentase anggota keluarga yang tinggal serumah

No	Anggota Keluarga yang disebut no. 39	F	%
1	Pasangan	17	41,46%
2	Anak	20	48,78%
3	Saudara Kandung	1	2,43%
4	Orangtua Suami	1	2,43%
5	Orangtua Istri	1	2,43%
6	Lainnya	1	2,43%
Total		24	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Tabel 5 Persentase Anak yang menjadi tanggungan keluarga

No	Anak yang menjadi tanggungan keluarga	F	%
1	0	4	16,67%
2	1	11	45,83%
3	2	7	29,17%
4	3	2	8,3%
5	>4	-	0%
Total		24	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Penelitian yang dilakukan Doshi (2000) menyatakan bahwa pendidikan dapat mengurangi kemiskinan secara langsung yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi masyarakat miskin dan memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Dengan demikian pendidikan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang menjadi faktor penting dalam mengurangi kemiskinan karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka distribusi pendapatan akan merata.

Selain itu gagasan mengenai pendidikan sangat penting dalam perolehan penghasilan diperkuat oleh Becker (1975: 17) bahwa daya produksi buruh mempunyai hubungan yang positif dengan taraf pendidikan dan latihan.

Semakin tinggi taraf pendidikan dan latihan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin produktif individu tersebut. Selanjutnya keadaan ini mewujudkan hubungan yang positif antara taraf pendidikan dengan pendapatan. Semakin tinggi pencapaian taraf pendidikan maka peningkatan daya pengeluaran, kemahiran, cara berpikir, dan kecakapan akan meningkatkan upah atau pendapatan seseorang. Investasi modal manusia yang dilakukan dengan pendidikan tidak dapat dirasakan langsung tetapi dapat dirasakan di masa depan.

Seseorang yang memiliki pendidikan rendah, kebanyakan diantara mereka tentu cara berpikirnya pun menjadi pendek. Mereka tidak dapat melihat setiap peluang dari lingkungan sekitar untuk menambah pendapatan yang diterima. Kebanyakan dari mereka hanya melihat apa yang sudah ada di depan mata serta dalam melakukan suatu pekerjaan hanya bermodalkan tenaga saja tanpa mau menggunakan otak untuk memikirkan hal-hal yang mungkin akan membuat lebih efisien dalam mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu mereka-mereka ini sering mengalami pemerasan tenaga oleh orang-orang yang memiliki pikiran lebih atau inovasi dalam mencari keuntungan dengan syarat-syarat yang mengikat sehingga mereka yang tidak memiliki kapasitas, tidak bisa bergerak untuk mencari peluang lain. Hal ini terjadi kepada para pekerja K3L Universitas Padjajaran dimana mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri dalam hal mencari pekerjaan layak tidak bisa berbuat apa-apa. Pendidikan rendah yang dimiliki mereka membuat mereka tidak bebas menentukan pekerjaan yang dikehendaki. Akibatnya mereka mau tidak mau harus menerima segala bentuk pekerjaan halal walaupun mereka tahu pihaknya akan dipersulit oleh perusahaan karena mereka tetap harus mendapatkan penghasilan walaupun sedikit untuk bertahan hidup.

Memang pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kehidupan sejahtera. Namun apa daya jika pendapatan seseorang saja hanya dapat memenuhi kebutuhan seperti pangan, papan, dan sandang. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebenarnya terdapat keinginan kuat dalam benak pekerja K3L Unpad untuk memasukkan anak-anak mereka ke dalam lembaga pendidikan. Sebagai orangtua tentu merupakan kewajiban untuk memenuhi segala keperluan anak-anaknya agar dapat menjadi

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 97- 107	Juli 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

insan yang berguna. Namun keterbatasan biaya yang menjadi salah satu faktor penghalang anak tidak bisa menerima pendidikan. Walaupun pemerintah saat ini sedang gencar menyediakan sekolah gratis, namun sekolah gratis tersebut biasanya hanya ada pada tingkatan Sekolah Dasar (SD). Untuk tingkat pendidikan selanjutnya seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) biasanya dikenakan biaya. Padahal seperti yang kita tahu, pembentukan karakter seseorang mau jadi apa dewasa kelak atau pematangan karakter terjadi pada usia pendidikan SMP atau SMA. Akibatnya mereka menjadi kehilangan motivasi untuk tetap melanjutkan pendidikan dan memilih mencari pekerjaan saja untuk tambahan rezeki keluarga. Karena mereka tidak memiliki kapasitas pendidikan yang tinggi, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki menjadi rendah sehingga mereka tidak bebas memilih lapangan kerja dengan penghasilan yang cukup. Akhirnya lapangan pekerjaan yang tersedia hanyalah pekerjaan dengan mengandalkan kekuatan otot atau tenaga dan penghasilan yang diterima pun rendah.

Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja mengenai alasan mengapa masyarakat khususnya daerah Jatinangor yang sekarang disebut sebagai kota pendidikan lebih mengutamakan mendapatkan banyak rezeki dibandingkan mengutamakan pendidikan. Dikutip dari blog Fakultas Psikologi Universitas Bina Nusantara (Binus University) mengungkapkan bahwa Indonesia bukanlah negara pendidikan karena Indonesia tidak pernah memandang pendidikan sebagai sesuatu yang penting di Indonesia. Oleh karena itu sangat susah apabila ingin diperbaiki pendidikan di Indonesia. Pandangan orang Indonesia masih berpegang teguh pada bagaimana cara mendapatkan banyak uang tanpa memikirkan bahwa langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan uang banyak adalah dengan pendidikan. Hal ini terbukti dari laman Kompasiana.com seorang mahasiswi bernama Eva Prianka jurusan pendidikan Luar Sekolah, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan berpikir, "untuk apa gunanya sekolah? Asalkan sudah bisa mencari uang, tidak perlu sekolah". Padahal sebagai masyarakat yang sudah terbuka pikirannya, pendidikan sangatlah diperlukan karena memiliki banyak manfaat.

Dalam hal ini Indonesia harus mengubah pandangan terhadap pendidikan di Indonesia

karena dengan pendidikan, Indonesia akan lebih bisa bersaing di dunia global pada saat ini. dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

### **C. PENYEBAB TIDAK DIBERLAKUKANNYA UMR BAGI PEKERJA K3L UNPAD**

Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Lubis, 1994: 30-31). Para ahli mengemukakan beberapa jenis upah (Kartasapoetra G, 1994: 102) :

1. Upah Nominal : sejumlah uang yang diayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengaruh jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja, dimana ke dalam upah tidak erdapat tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya.
2. Upah nyata : upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak.
3. Upah Minimum : dapat mencukupi kebutuhan hidup buruh itu serta keluarganya walaupun dalam arti yang sederhana
4. Upah wajar : upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

Basu Swastha (1993: 268) mengatakan bahwa tingkat upah bagi buruh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

1. Pasar tenaga kerja
2. Tingkat upah yang berlaku di daerah tersebut

3. Tingkat keahlian yang diperlukan
4. Situasi laba perusahaan
5. Peraturan pemerintah

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat upah pekerja : (Simanjuntak, 1998: 128)

1. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan  
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan. Hal itu juga berlaku apabila seseorang memiliki tingkat ketrampilan yang tinggi, tentu inovasi-inovasi yang dihasilkan akan bernilai guna tinggi
2. Persentase biaya pekerja terhadap biaya produksi  
Semakin kecil proporsi biaya pekerja terhadap penjualan maka semakin tinggi tingkat penghasilan yang didapat
3. Berdasarkan keuntungan perusahaan  
Semakin besar keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan dan semakin besar absolut keuntungannya juga maka penghasilan yang didapat oleh para pekerja pun menjadi meningkat juga
4. Berdasarkan besar kecilnya perusahaan  
Perusahaan besar lebih mampu memberikan upah yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil
5. Tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan  
Semakin efektif manajemen perusahaan, semakin efisien cara penggunaan faktor produksi maka semakin besar upah yang dapat dibayarkan kepada para pekerja
6. Kemampuan atau kekuatan serikat pekerja  
Tingkat upah di perusahaan yang serikat pekerja kuat biasanya lebih tinggi daripada tingkat upah di perusahaan yang serikat pekerja lemah.
7. Karena adanya faktor kelangkaan
8. Besar kecilnya resiko atau mendapatkan kecelakaan di lingkungan kerja
9. Adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan upah minimum

UMR adalah Upah Minimum Regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam

lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan, dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Adapun Undang-Undang yang melindungi keberlangsungan UMR yaitu dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMR dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.

Penetapan upah minimum bergantung pada situasi dan kondisi pendapatan nasional. Juga dikaitkan dengan keadaan perekonomian di setiap provinsi atau kabupaten. Aspek-aspek yang menjadi acuan dalam upah minimum antara lain : (Jehani, 2008:16)

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
2. Indeks Harga Komponen (IHK)
3. Kemampuan dan perkembangan serta kelangsungan perusahaan
4. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah yang berlaku tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

Dalam peraturan ketenagakerjaan, dikenal juga Upah Minimum yang diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Upah Minimum adalah upah bulanan terendah terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap".

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 97- 107	Juli 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

Maka dari upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerjaan/buruh supaya tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). (Nugroho 2005: 28)

Melihat penjelasan diatas mengenai UMR seharusnya pekerja K3L Unpad memiliki peluang mendapatkan pendapatan jauh lebih tinggi dari yang sekarang diterima. Jika kita analisis dari aspek-aspek yang menjadi acuan dalam upah minimum (Jehani, 2008: 16), maka Universitas Padjajaran sudah memenuhi kelima aspek yang disebutkan diatas. Universitas Padjajaran saat ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu Universitas Negeri terbaik di Indonesia. Melihat hal itu, secara langsung perekonomian dalam Universitas tersebut adalah baik adanya. Selain itu Universitas Padjajaran saat ini merupakan sebuah Universitas berbasis PTN-BH dimana segala persoalan kampus diberikan otonomi secara utuh kepada pihak Universitas.

Namun jika dilihat dari jam kerja pekerja K3L Universitas Padjajaran yang hanya memakan waktu 5 jam atau setengah hari saja, tentu usaha mendapatkan penghasilan sesuai UMR kota Sumedang kecil kemungkinannya. Menurut UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa UMR wajib diberikan kepada para buruh/karyawan yang bekerja selama 40 jam seminggu atau 8 jam per hari jika hanya bekerja selama 5 hari dan atau 7 jam per hari jika bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Pekerja K3L Unpad yang hanya bekerja 5 jam per hari dan dikerjakan selama 5 hari saja bukanlah termasuk dalam kategori pekerja yang berhak menerima UMR. Dalam hal ini para pekerja K3L Unpad belum dapat dikatakan sebagai pekerja purna waktu karena tidak bekerja selama 1 hari penuh.

Selain itu adanya kejanggalan dalam status pekerja K3L Unpad ini apakah termasuk kedalam paruh waktu atau purna waktu tidak memiliki kejelasan. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkataan Wakil Rektor III Universitas Padjajaran yang menaungi sarana dan prasarana dimana ia saja tidak tahu menahu tentang status pekerja K3L Unpad ini apakah termasuk pekerja tetap ataukah pekerja honorer sehingga inilah alasan yang diberikan dari pihak Unpad mengenai upah yang diberikan tidak sesuai dengan UMK Kota Sumedang.

#### **D. PERAN PEKERJA SOSIAL MENGATASI PERMASALAHAN K3L UNPAD**

Menurut International Federation of Social Worker (ISFM), pekerjaan sosial (social worker) adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pekerjaan sosial adalah sebuah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Inti tujuan keberadaan pekerja sosial yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah klien, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosial si klien. Selain itu pekerja sosial pun menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan seperti contoh kliennya merupakan warga miskin maka pekerja sosial menghantarkan si klien untuk ikut pelatihan kewirausahaan agar si klien dapat mengembangkan kapasitasnya sendiri menuju kehidupan lebih sejahtera. Selain itu dalam menangani masalah si klien, metode penyembuhan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial terbagi menjadi 3 yaitu pendekatan mikro (keluarga), makro (komunitas, kelompok), dan meizo (negara, pemerintah, lembaga).

Merujuk pada masalah K3L Unpad mengenai hak-hak sebagai pekerja banyak yang tidak dihiraukan terutama tentang persoalan upah, maka sebagai pekerja sosial sudah merupakan tugas kita membantu mereka untuk mendapatkan hak-haknya agar mereka dapat mencapai kesejahteraan hidup. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode pendekatan makro karena masalah yang dihadapi harus berhadapan dengan suatu perusahaan. Pekerja sosial membantu pekerja K3L Unpad mendapatkan hak-haknya, juga membantu meminta kejelasan dari pihak Universitas Padjajaran mengenai status pekerja yang dijalankan, apakah termasuk pekerja purna waktu ataukah pekerja paruh waktu.

Sebagai pekerja sosial, selain membantu klie mengatasi permasalahan kepada pihak yang

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 97- 107	Juli 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

terkait yaitu Universitas Padjajaran, pekerja sosial juga memiliki tugas yaitu memberdayakan si klien yang dalam hal ini adalah memberdayakan pekerja K3L Unpad. Hal ini dilakukan agar pekerja K3L Unpad dalam mendapatkan penghasilan, tidak bergantung pada pekerjaannya saja yaitu sebagai pekerja K3L Unpad, tetapi dapat mencari tambahan pekerja lain mengingat jam kerja sebagai pekerja K3L Unpad hanya 5 jam sehari dan dilakukan hanya selama 5 hari saja dalam seminggu. Untuk itu sisa waktu yang dimiliki oleh pekerja K3L Unpad dapat digunakan mencari pekerjaan lain seperti berjualan atau menyediakan jasa laundry baju mahasiswa ataupun bekerja paruh waktu di rumah makan yang ada di sekitar Jatinangor. Dengan begitu tingkat kesejahteraan hidup dapat sedikit meningkat.

### Simpulan

K3L Unpad adalah petugas kebersihan di Universitas Padjajaran yang bertugas membersihkan halaman, merawat tanaman, dan menjaga kelestarian serta kenyamanan lingkungan kampus. Pekerja K3L Unpad sengaja dibentuk oleh kampus karena timbulnya rasa kepedulian Unpad terhadap kesejahteraan warga sekitar yaitu Jatinangor dengan tujuan yaitu membantu perekonomian warga masyarakat. Namun tujuan tersebut ternyata menimbulkan kekecewaan bagi warga masyarakat Jatinangor sebab pendapatan yang diterima sangatlah rendah dan jauh dari rata-rata UMR Kota Sumedang sehingga tujuan awal dibentuk K3L Unpad ini menjadi sia-sia. Selain itu harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat, semakin menambah penderitaan mereka untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tak jarang pihak Universitas banyak melakukan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan kepada pekerja K3L Unpad seperti tidak memberikannya uang lembur, tidak mendapatkan jaminan sosial, dan tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana sangat jelas tertulis dalam UU Ketenagakerjaan mengenai hak-hak apa saja yang wajib diterima oleh pekerja. Pendapatan

### Ucapan Terimakasih

Dalam membuat artikel mengenai tingkat pendidikan pekerja K3L di Universitas padjajaran, penulis pertama-tama mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya

yang rendah juga mengakibatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan yang harus diterima oleh anak-anak mereka menjadi terhalang oleh karena kekurangan biaya sehingga kapasitas untuk merubah kehidupan menuju lebih baik menjadi kecil kesempatannya. Namun di satu sisi rasa kekecewaan para pekerja K3L Unpad ini tidak bisa tersalurkan oleh karena status pekerjaan mereka yang belum jelas antara pekerja purna waktu dengan pekerja paruh waktu sehingga tuntutan mereka agar penghasilan yang diterima senilai dengan UMK yang telah ditetapkan pemerintah di Kota Sumedang ataupun mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan yang wajib diterima oleh pekerja ditolak. Untuk itu peran pekerja sosial dalam hal ini sangatlah dibutuhkan yaitu selain menyuarakan status pekerjaan mereka, juga menyuarakan hak-hak mereka kepada pihak Universitas Padjajaran agar dapat memiliki penghasilan yang lebih guna mencapai kehidupan yang sejahtera yaitu semua kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Selain itu pekerja sosial juga memberdayakan pekerja K3L Unpadnya agar jangan bergantung pada pekerjaan mereka yang sekarang ini, melainkan dapat mencari peluang kerja lain mengingat jam kerja saat bekerja sebagai pekerja K3L Unpad hanya setengah hari saja.

### Saran

Pihak Universitas harus sesegera mungkin menentukan status mereka apakah termasuk kedalam paruh waktu ataukah purna waktu. Apabila status akhir pekerjaan mereka adalah pekerja paruh waktu, sangat di harapkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan mereka mengingat harga kebutuhan pokok sudah meningkat dari hari ke hari serta dapat memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga walaupun tidak banyak. Namun apabila status akhir mereka merupakan pekerja paruh waktu, diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan yang diterima dan juga pembayaran uang lembur atau penerimaan uang THR sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas pembuatan artikel ini dengan baik. Selain itu penulis juga sangat berterimakasih kepada orang-rang disekitar yaitu Pertama, kedua orang tua yang telah

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 97- 107	Juli 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

memberikan dukungan semangat dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya Kedua, kepada dosen pembimbing, Pak Ishartono yang dengan sabar dan teliti mau membimbing penulis untuk pembuatan artikel ini, dan yang terakhir kepada teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu dimana sudah turut bekerja sama dengan baik untuk memenuhi syarat-syarat pembuatan artikel. Tiada kata yang dapat diucapkan oleh penulis kepada mereka selain ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Penulis juga menyadari bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penggunaan kata dalam penulisan artikel ini. Semoga kedepannya dapat dijadikan pelajaran untuk membuat artikel lebih baik lagi. Terimakasih.

#### Daftar Pustaka

- **Sumber Online**

- Giang, Randi. Juni 2013. Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan
- Pineleng. *Jurnal EMBA Vol 1(3):249*. Retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1733> diakses pada 20 Juni 2018
- Itang. (1 Januari-Juni 2015). Faktor-Faktor Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Vol 16(1):6. 20 Juni 182018. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/206/208>
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (September 21, 2015).
- Jumlah Penduduk Indonesia Terbesar ke Empat Dunia Setelah China, India dan Amerika. Retrived from: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-indonesia-terbesar-ke-empat-dunia-setelah-china-india-dan-amerika> diakses pada 20 Juni 2018
- Lapeti Sari & Eriyati & Ira Yanita. Agustus 2009. Analisis Tingkat Upah di Kota Pekanbaru (studi kasus rumah makan/restoran). *Jurnal Ekonomi Vol 17(2): 89-92*. Retrieved from: <https://media.neliti.com/media/publications/8763-ID-analisis-tingkat-upah-pekerja-di-kota-pekanbaru-studikasus-rumah-makan-restoran.pdf> diakses pada 20 Juni 2018
- Pertiwi, Pitma. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Retrived from: [http://eprints.uny.ac.id/21513/1/SKripsi\\_PITMA%20PERTIWI\\_11404241038.pdf](http://eprints.uny.ac.id/21513/1/SKripsi_PITMA%20PERTIWI_11404241038.pdf) diakses pada 20 Juni 2018
- Purnama, Ricky. Juni 2017. Apakah yang dimaksud dengan kemiskinan struktural dan kemiskinan relatif. Retrived from: <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-kemiskinan-absolut-dan-kemiskinan-relatif/8370/2> diakses pada 20 Juni 2018
- Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia. February 17, 2017. Retrieved from: <https://psychology.binus.ac.id/2017/02/17/rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/> diakses pada 20 Juni 2018
- Tribun Jabar (Ravianto). November, 8 2017. Pengangguran di Indonesia Tinggi Karena Lulusan Perguruan Tinggi Terlalu ‘Milih’ Pekerjaan. Retrieved from: <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/08/pengangguran-di-indonesia-tinggi-karena-lulusan-perguruan-tinggi-terlalu-milih-pekerjaan?page=3> diakses pada 20 Juni 2018
- Triguswinri, Krisnaldo. November, 27 2017. Serikat Pekerja Padjajaran: Kampus Perjuangan, Kampus Kerakyatan. *Koran Perdjoeangan.com*. Retrieved from: <https://www.koranperdjoeangan.com/serikat-pekerja-padjajaran-kampus-perjuangan-kampus-kerakyatan/> diakses 20 Juni 2018

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 97- 107	Juli 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------

- **Sumber buku**

Adisasmata, Raharjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. GRAHA ILMU

Alamsyah, Capi Yusrun. 2015. Praktik Pekerjaan Sosial Generalis: Suatu Tuntutan Intervensi. Pustaka Pelajar

Yamin, Mohammad. 2009. Menggugat Pendidikan Indonesia: belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Ar-Ruzz Media. Sleman, Jogjakarta.